

**RESPON WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERHADAP
PENENTANGAN INDIA TENTANG ATURAN PEMBATAAN DOMESTIC
SUPPORT ON AGRICULTURE DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG
2001-2013**

*WORLD TRADE ORGANIZATION REPOSE AGAINTS INDIA'S OPPOSITION ABOUT
CAPPING DOMESTIC SUPPORT ON AGICULTURE RULES
IN DEVELOPING COUNTRIES 2001-2013*

Sulbi Putri Widynar

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

SulbiPutri@gmail.com

Abstract

This article will throw light on the phenomenon of globalization that is redefining the role of the State in international trade. As well, globalization becomes a view that transformation of international trade regime-WTO- that is something that might happen. Domestic support policy on agriculture led to the onset of agriculture issues pressing the developing countries. The problem is pushing India to demonstrate its opposition in any WTO meetings. This was followed with the transformation of the paradigm of the WTO to consider the interests of developing countries.

Keywords: Transformationalist Globalist, India, WTO, Developing Countries.

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang fenomena globalisasi yang mendefinisikan ulang peran negara dalam tata perdagangan internasional. Serta, globalisasi menjadi sebuah pandangan bahwa transformasi sikap rezim perdagangan internasional -WTO- merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Kebijakan *domestic support on agriculture* menyebabkan timbulnya permasalahan pertanian yang menekan negara sedang berkembang. Masalah tersebut mendorong India untuk menunjukkan penentangannya dalam setiap pertemuan WTO. Yang kemudian diikuti dengan adanya transformasi paradigma WTO untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara sedang berkembang.

Kata Kunci: Globalisasi Transformasionalis, India, WTO, Negara Sedang Berkembang

PENDAHULUAN

Membahas mengenai perekonomian internasional, isu globalisasi sering dikaitkan dengan adanya ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik antara negara maju dan negara sedang berkembang (NSB). Seiring dengan adanya fenomena globalisasi yang menciptakan dunia yang ‘tanpa batas’, perdagangan bebas menjadi salah satu bentuk dari hadirnya fenomena globalisasi. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari adanya peran *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan rezim internasional yang mengikat negara anggota disahkan pada tahun 1995 menggantikan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) (Kemenlu, 2016). Seiring dengan pentingnya bidang pertanian, WTO mengesahkan *Agreement on Agriculture* (AoA) yang mengatur tentang pembatasan *domestic support* pada 1 Januari 1995. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir hambatan yang mungkin disebabkan oleh kebijakan dukungan domestik.

Aturan *domestic support* itu sendiri merupakan pengurangan campur tangan negara dalam menentukan perekonomian. Diungkapkan dalam artikel WWF, *Agriculture in Uruguay*

Round: implications for Sustainable Development in Developing Countries” dalam *Third World Resurgence* No. 100/101 Dec. 98/Jan 99, *The WTO, Agriculture and Food Security* secara ringkas disebutkan bahwa, “Pengurangan dukungan domestik, pengurangan total atas subsidi domestik yang dianggap “mendistorsi perdagangan” akan berkisar pada 20 persen dari AMS (*Aggregate Measure of Support*) dari acuan periode 1986-1988. Untuk negara berkembang pengurangannya sebesar dua pertiganya, yaitu 13.3 persen. Aturan ini tidak berlaku bagi negara yang AMS-nya tidak melebihi 5 persen (yaitu yang sedikit atau tidak menjalankan dukungan terhadap pertaniannya) atau untuk negara berkembang yang AMS-nya kurang dari 10 persen. Pengecualian diberikan untuk subsidi yang berdampak kecil pada perdagangan serta pembayaran langsung pada produksi yang terbatas.” (Hasibuan, 2015). Dalam Persetujuan Bidang Pertanian dengan mengacu pada sistem klasifikasi HS (*harmonized system of product classification*) dijelaskan bahwa produk-produk pertanian didefinisikan sebagai komoditi dasar pertanian seperti beras, gandum, dan lain-lain, serta produk-

produk olahannya seperti roti, mentega (Utama, 2010).

Kebijakan pembatasan *domestic support on agriculture* tersebut menuai banyak masalah yang terjadi pada NSB. Ketika NSB harus menyesuaikan kebijakan yang bersifat sangat mengikat, sementara kebijakan tersebut belum sesuai dengan keadaan pertumbuhan ekonomi NSB yang belum cukup tinggi untuk bersaing dengan negara maju. Ini menimbulkan sebuah implikasi bahwa, kebijakan pembatasan *domestic support on agriculture* merupakan sebuah cara negara maju untuk mendominasi NSB. Timbulnya masalah dan implikasi ini mendapatkan reaksi keras dari India. Sejak dikeluarkan aturan *domestic support* dalam AoA, India tidak bisa memberikan subsidi yang sama besarnya ketika sebelum adanya kebijakan tersebut. Diawali dengan aksi protes petani India, kemudian diikuti dengan pemerintah yang secara tegas menentang dalam forum WTO. India dengan sikap tegasnya akhirnya mendapatkan respon dari WTO dengan diikuti menyerahkan negara maju kepada India. Akhirnya pada tahun 2008, persoalan *agriculture* menjadi

agenda utama pada pertemuan WTO pada tahun 2013 di Bali.

Tulisan ini ingin memaparkan Mengapa *World Trade Organization* (WTO) mengakomodasi penentangan India terhadap aturan pembatasan *domestic support on agriculture* di negara sedang berkembang. Permasalahan ini akan dianalisa dengan kerangka pemikiran *Middle Power State*, dan *Transformasionalist Globalist*.

PEMBAHASAN

ISU PEMBATAHAN DUKUNGAN DOMESTIK DALAM AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA)

Agreement on Agriculture atau Persetujuan Bidang Pertanian merupakan sebuah pakta yang bertujuan untuk melaksanakan reformasi kebijakan perdagangan dalam bidang pertanian untuk menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang berorientasi pasar. AoA dibentuk dalam kerangka liberalisasi perdagangan komoditas pertanian dengan membuat kebijakan-kebijakan yang adil serta berorientasi pasar. Ciri terpenting dan khas dari penandatanganan perjanjian AoA adalah “penyesuaian” kebijakan dan

mekanisme pembuatan kebijakan nasional (Hasibuan, 2015).

AoA yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5, memiliki tiga pilar yaitu dukungan domestik, perluasan akses pasar, serta subsidi ekspor (Putra, 2016). Dukungan domestik menjadi sebuah pilar yang sangat sering diperdebatkan karena signifikansi dampak terhadap produksi pertanian dalam negeri yang sangat besar. *Domestic Support* ini sendiri muncul akibat riwayat kebijakan subsidi besar-besaran dalam industri pertanian yang dilakukan oleh negara-negara maju, yang pada saat perjanjian ini dinegosiasikan, telah banyak menyebabkan distorsi perdagangan khususnya perdagangan dalam produk pertanian (Rezlan Ishar Janie, 2008). Dalam pilar *domestic support* terdapat tiga kotak yang mengatur masing-masing subsidi. Yaitu:

1. **Amber Box (Kotak Jingga)** : Di dalam *Amber Box* mengatur tentang semua subsidi domestik yang dianggap mendistorsi produksi dan perdagangan (Pasal 6 AoA). Subsidi dalam kategori ini adalah subsidi total yang

dihitung dalam *Aggregate Measurement Support (AMS)*. Definisi *Aggregate Measurement of Support (AMS)* di dalam Bagian I, Artikel I AoA adalah tingkat bantuan per tahun yang diberikan pada suatu produk pertanian berpihak kepada petani secara umum, dengan pengecualian program bantuan seperti tercantum pada Annex 2

2. **Blue Box (Kotak Biru)** : *Blue Box* adalah *Amber Box* dengan persyaratan tertentu yang ditujukan untuk mengurangi distorsi. Dukungan domestik yang biasanya dikategorikan sebagai *Amber box* akan dimasukkan ke dalam *Blue Box* jika hal tersebut juga menuntut dikurangnya produksi oleh para petani (Pasal 6:5 AoA) (Rezlan Ishar Janie, 2008). *Blue box* ini tidak akan diberikan kepada petani maupun peternak yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah produktifitasnya (Lokollo, 2007)

3. **Green Box (Kotak Hijau)** : *Green box* merupakan kelompok subsidi yang tidak berpengaruh atau pengaruhnya sangat kecil

terhadap perdagangan. Subsidi tersebut harus dibiayai oleh dari anggaran pemerintah (tidak dengan membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi) dan harus tidak melibatkan subsidi terhadap harga (Annex 2 AoA) (Rezlan Ishar Janie, 2008).

Sekilas memang terlihat bahwa tujuan dari direalisasikannya AoA merupakan sebuah terobosan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memacu pertumbuhan ekonomi di NSB sehingga terciptanya pemerataan ekonomi di semua negara anggota WTO. Dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan *domestic support on agriculture* dalam AoA yang cukup rumit dan bersifat ‘*tricky*’ (memperdaya), sehingga muncullah dampak-dampak yang tidak menguntungkan bagi NSB. Adapun dampak yang dialami NSB yaitu:

- 1. Adanya proses liberalisasi pertanian yang radikal :** Sistem *domestic support* dalam AoA berarti menyerahkan nasib petani di NSB kepada “*free-fight liberalism*” yang berarti siapa yang kuat, dia yang menang.

- 2. Penurunan produktivitas neraca pertanian:** Dengan adanya pembatasan *domestic support* produktivitas petani berdampak pada semakin rendahnya surplus produksi pertanian sehingga semakin rendahnya neraca produksi pertanian domestik.
- 3. Meningkatnya produk impor:** Dampak dari menurunnya produktivitas neraca pertanian domestik, produk impor menjadi sebuah cara untuk memenuhi kebutuhan pangan NSB.
- 4. NSB tidak mempunyai keunggulan komparatif :** Pembatasan *domestic support* yang terjadi mengakibatkan NSB yang belum tidak mampu bersaing dalam pasar internasional tidak mempunyai keunggulan komparatif.

Dari dampak-dampak inilah, terdapat sebuah anggapan bahwa negara maju ingin mendominasi sektor pertanian di NSB.

Tabel 2. 1 Perbedaan Negara Maju dan Negara Sedang Berkembang (NSB)

Parameter	Negara Maju	NSB
Dasar Sistem Pertanian	Komersial, <i>Export Oriented</i>	Penghidupan
Share of GDP	3%	26%
Kontribusi terhadap Devisa	8.3 %	27%
Masyarakat Petani	4 %	70 %
Orientasi Pasar	Tinggi	Lemah
Kapasitas Administrasi	Tinggi	Lemah

Sumber: Tabel oleh Green, D. and Priyadarshi, S. (2001) *Proposal for a 'Development Box' in the WTO Agreement on Agriculture, CAFOD and South Centre*, Oktober dan Kaukab, R., (2002) *Presentation at Agriculture and WTO Seminar, Ministry of Commerce, Government of Pakistan, Islamabad*, Agustus 2002 dalam www.ActionAid.org. (ActionAid, 2003)

Faktor tersebut menjadi landasan bahwa AoA dikeluarkan untuk menyeimbangkan persaingan pasar antara negara maju dan NSB dalam bidang pertanian. Akan tetapi kenyataan yang dihadapi berbanding terbalik. Sejak dikeluarkannya AoA untuk mengatur perdagangan komoditas pertanian tahun 1995, timbul sebuah implikasi ketimpangan perlakuan (*treatment*) WTO di negara maju dengan NSB. Adanya sebuah anggapan bahwa AoA lebih menguntungkan negara maju dan meniskreditkan kepentingan NSB. AoA kemudian menjadi celah bagi negara maju untuk melakukan dominasi

di NSB. Dominasi negara maju terhadap NSB ini kemudian menjadi masalah yang harus dihadapi NSB. Hampir 75 persen NSB menjadikan sektor pertanian sebagai pusat perekonomian.

PENENTANGAN INDIA TERHADAP PEMBATAAN DOMESTIC SUPPORT ON AGRICULTURE DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

India, sebuah negara dengan penduduk terbesar kedua dengan pertanian sebagai komoditas utama dalam perekonomian. Berdasarkan Prediksi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimuat dalam *U.N. News Service* menyebutkan bahwa “Penduduk dunia diproyeksikan akan mencapai 8,5 miliar pada 2030, 9,7 miliar pada 2050, dan 11,2 miliar pada 2100, demikian menurut laporan baru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan 29 Juli 2015. Penduduk dunia saat ini berkisar 7,3 miliar jiwa dengan Jumlah Populasi India melampaui Tiongkok sebagai negara dengan penduduk terpadat pada 2022” (U.N. News Service, 2015). Dengan kondisi yang demikian, India harus mampu untuk memberikan jaminan ketahanan pangan bagi setiap penduduknya. Beras merupakan

komoditas paling utama yang dihasilkan oleh petani India. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan teknologi, India mampu untuk men-supply komoditas pertaniannya sebagai komoditas ekspor. Namun, fluktuatif pendapatan hasil pertanian di India tidak dapat dipisahkan dari besarnya *domestic support* yang dikeluarkan pemerintah India untuk mengawasi serta mengontrol kestabilan harga komoditas pertanian domestik.

Skema *Domestic support* dalam *Agreement on Agriculture* oleh WTO mempunyai pengaruh yang signifikan pada setiap negara anggota termasuk India yang menjadikan *agriculture* sebagai komoditas utama dalam pilar perekonomiannya. . Maka dari itu, dalam penentangan India terhadap pembatasan *domestic support on agriculture* India mempunyai kepentingan, adapun kepentingan India adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Pangan

Permasalahan produktivitas pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan di suatu negara. Adanya peraturan pembatasan *domestic support on agriculture* berdampak pada hasil panen India. Berdasarkan data *Economic Survey 2013-2014*, terjadinya

peningkatan jumlah lahan tidak diikuti dengan peningkatan hasil panen komoditas pertanian bahan pokok. Masalah ketahanan pangan ini kemudian berdampak pada tingkat kelaparan penduduk India. Dalam laporan *Global Hunger Index*, India berada pada peringkat 55 dari 76 negara (Tobing, 2015). India yang diwakili oleh Anand Sharma selaku Menteri Industri dan Perdagangannya menyatakan bahwa isu ketahanan pangan merupakan isu yang tidak dapat dinegosiasikan bagi India karena berhubungan langsung dengan masalah mata pencaharian jutaan petani upah serta ketahanan pangan masyarakat miskin (Government of India, 2013).

2. Pengentasan kemiskinan

Berdasarkan laporan India *Planning commission* rasio kemiskinan di India yang cukup tinggi yakni, 21.9 persen pada tahun 2011-2012 (Planning Commission of India, 2011). Rasio angka penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan inilah yang menjadikan India sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi kelaparan yang tinggi.

3. Mengimbangi Dominasi Negara Maju

India sebagai negara berkembang tidak ingin terus untuk mengikuti skema yang dibentuk oleh negara maju agar dapat mendominasi NSB. Dari skema pembatasan *domestic support on agriculture* NSB dilihat adanya kecurangan negara maju dalam mengelompokkan besaran subsidi dalam kategori *boxes*. India tidak ingin bahwa negara maju mendominasi perekonomian yang ada di NSB. Sebagai negara raksasa berkembang, India ingin menguatkan perekonomiannya sehingga dapat bersaing dan diperhitungkan dalam sistem perekonomian global. Dalam kaitannya dengan posisi India untuk mendapatkan posisi tawar yang tinggi dalam perekonomian internasional.

4. Resistensi Peran WTO

Penentangan India tidak diikuti dengan keluarnya India dari WTO, sikap ini menarik ketika India ingin memperjuangkan hak-hak petani untuk melawan liberalisasi ekonomi, akan tetapi India tidak ingin untuk keluar dari rezim perdagangan Internasional. India bukan hanya dengan kelompok G-33 akan tetapi juga kelompok G-20 setuju untuk menginisiasikan adanya perubahan dalam aturan pembatasan *domestic support on agriculture* (Utama, 2010),

dapat disimpulkan bahwa India ingin melakukan resistensi peran WTO di dunia Internasional.

Keseriusan India terhadap masalah pertanian ditunjukkan India dengan melakukan penentangan terhadap aturan *domestic support on agriculture*. Penentangan ini diawali dengan adanya aksi demo petani India pada KTM WTO Juni 1999 di Jenewa. Setelah itu diikuti dengan aksi demo forum petani India (Indian Kisan Sabha) pada tahun 2001 di Mumbai. Sehingga, pada tahun 2001 sejak dibukanya *Doha Development Agenda* menjadi momentum bagi India untuk dapat mengutarakan tuntutan kepada WTO dalam draft negosiasi.

Resmi dibukanya *Doha Round*, November 2001 menjadi awal yang baik bagi pemerintah India. Dari adanya hal tersebut, India membentuk sebuah aliansi negara yang memiliki kepentingan yang sama yaitu kelompok negara G-33. Kelompok Negara G-33 aliansi negara berkembang dan negara kurang berkembang dengan populasi penduduk yang besar, dan sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Latar belakang dari dibentuknya proposal G-33 adalah melakukan perombakan

aturan dalam skema AoA yang mendapatkan penentangan. Proposal usulan G-33 menekankan bahwa WTO harus mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi NSB untuk menyesuaikan diri dengan aturan pembatasan *domestic support on agriculture*.

Selain itu, India juga bergabung dalam kelompok G-20, kelompok ini merupakan kelompok negara yang tidak hanya menjadi aliansi NSB akan tetapi juga terdapat beberapa negara maju yang menjadi anggota. India dalam hal ini menekankan kepentingan NSB dengan kekuatan diplomasi agar negara maju setuju untuk melakukan transformasi kebijakan pembatasan *domestic support on agriculture*. Sehingga, isu pertanian yang berhasil ditekankan oleh NSB kelompok G-20 ini adalah menentang pembatasan subsidi domestik dan subsidi ekspor pertanian di negara industri maju, menentang liberalisasi, menghendaki *Special and Differential Treatment* (SDT) bagi NSB (Utama, 2010).

Proses penentangan India terhadap pembatasan aturan *domestic support on agriculture* mendapatkan jalan panjang, sejak awal KTM keempat WTO yang menghasilkan Doha Development Agenda (DDA), India

belum mendapatkan respon positif dari draft negosiasi adanya transformasi aturan dalam perjanjian AoA. Kebuntuan DDA terjadi selama kurang lebih 12 tahun, yang akhirnya mendapatkan keputusan dari WTO pada tahun 2013 yang dikenal dengan Bali Package. Keputusan Bali package, WTO mengakomodasi penentangan India terhadap pembatasan *domestic support on agriculture* dalam draft proposal negosiasi proposal G/AG/NG/W/102 (WTO, 2016).

India dalam posisi ini adalah menentang WTO atas dasar kepentingan masyarakat India yang sangat besar. Dengan sumber daya manusia yang tinggi, dan sumber daya alam yang sangat besar India mempunyai posisi tawar yang diperhitungkan dalam dunia internasional. Peran India sangat signifikan dalam mengarahkan tujuan kelompok G-33. NSB yang tergabung dalam kelompok negara G-33 memandang India menjadi salah satu negara yang berpengaruh dan raksasa negara berkembang saat ini (Bary, 2013). Meningkatnya posisi tawar India terhadap dunia internasional berdampak pada kekuatan diplomasi yang dimiliki India sebagai NSB yang diperhitungkan. Diplomasi India

merupakan strategi politik luar negeri yang utama dimiliki India sebagai NSB karena terbatasnya militer dan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, dilihat bahwa India bukan lagi sebagai negara peripheral akan tetapi negara yang mempunyai *Middle power* dengan kekuatan diplomasi yang tinggi dan mempunyai posisi tawar yang diperhitungkan dalam dunia internasional. Cooper menerangkan bahwa:

“Proposed that pursuing multilateral solutions to international problems, preferring compromise positions in international disputes and embracing notions of good international citizenship constitute the typical behavior of a middle power” (Cooper, 1993).

Penyelesaian negosiasi masalah pembatasan *domestic support on agriculture*, India melakukan perannya sebagai NSB dengan mengakomodasi kepentingan NSB yang diupayakan dalam negosiasi KTM WTO dengan menekan negara maju untuk setuju terhadap proposal negosiasi yang diajukan oleh India tersebut. Shin, Dong-Min dalam bukunya, *Concept of Middle Power and the Case of the ROK* menerangkan bahwa (Shin, 2012):

“A middle power is a state actor which has limited influence on deciding the distribution of power in a given

regional system, but is capable of deploying a variety of sources of power to change the position of great powers and defend its own position on matters related to national or regional security that directly affect it”

RESPON WTO TERHADAP TUNTUTAN REFORMASI INDIA

Pasca Perang Dunia II, masyarakat di dunia internasional menyadari bahwa perlunya sebuah organisasi untuk mengatur perdagangan antar negara agar berjalan dengan baik, lancar dan saling menguntungkan. Diharapkan bahwa dengan terbukanya pasar domestik dalam skema perdagangan bebas internasional dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi setiap negara anggota. Peran WTO dalam menentukan arah perdagangan internasional sangat dominan, selain dengan anggota yang besar WTO juga mengatur berbagai aspek perdagangan. Memenuhi perannya dalam perdagangan internasional, terdapat prinsip-prinsip dasar yang menaungi berjalannya perjanjian WTO, yaitu (WTO, 2016):

1. Prinsip non-diskriminasi

- *Most favoured nation (MFN): Treating other*

people equally: Semua negara dalam pandangan WTO diberlakukan sama, tidak boleh adanya diskriminasi terhadap mitra dagangnya.

- **National Treatment** : Perlakuan yang sama dalam hal pajak, daerah pemasaran terhadap produk barang, jasa, merek, undang-undang hak cipta dan hak paten impor maupun lokal.

2. **Free Trade: gradually, through negotiation**

Prinsip ini adalah sebuah prinsip yang memberikan dorongan bagi setiap negara untuk membuka pasar sebebaskan-bebasnya. Akan tetapi dalam hal ini terjadinya pasar bebas merupakan sebuah produk dari negosiasi antar negara anggota WTO.

3. **Dapat Diprediksi**

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap perdagangan yang dilakukan negara dengan mitranya harus dapat diprediksi sehingga terciptanya stabilitas dan perdikbilan yang mendorong pertumbuhan ekonomi semakin stabil.

4. **Mendorong Persaingan yang Adil**

Sesuai dengan prinsip perdagangan bebas yang bertahap, akan tetapi mekanisme MFN dan *national treatment* dapat mengurangi praktek dumping subsidi serta hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

5. **Mendorong Pembangunan dan Pembaharuan Ekonomi**

Diharapkan bahwa dengan adanya WTO membawa kontribusi positif bagi pembangunan dan pembaharuan ekonomi di negara berkembang. WTO memberikan kesempatan dan kelonggaran bagi NSB dan negara kurang berkembang.

Selain prinsip tersebut, WTO juga memiliki tiga prinsip lain dalam negosiasi, yaitu Prinsip Fundamental, Asas Resiprositas, dan *Sindle Undertaking*. WTO dalam setiap perjanjian dan perannya dalam perdagangan internasional sudah seharusnya berdasar pada prinsip-prinsip tersebut. Akan tetapi, pandangan yang berbeda diberikan oleh NSB. Keputusan WTO yang diimplikasikan merupakan kepanjangan dari kepentingan negara maju diperjelas

dengan adanya fakta bahwa pemilihan ketua sidang yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi dimana proses negosiasi bersifat eksklusif. WTO cenderung melakukan negosiasi terbatas dan hanya melibatkan negara-negara tertentu (*green room*) yaitu AS dan Uni Eropa (Sasmita, 2015). Prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi landasan WTO kemudian terdegradasi. Kepentingan NSB dikesampingkan. Ketika kepentingan negara maju selalu diakomodasi oleh WTO yang menekan NSB untuk menyetujui kepentingan tersebut. Adapun kritik ini didasarkan pada dua masalah pokok yaitu (Sasmita, 2015):

- i. Komitmen dan implementasi perjanjian negara maju yang tidak sesuai dengan NSB
- ii. Permasalahan yang dihadapi oleh NSB dihadapkan pada kendala untuk mengubah kebijakan sesuai dengan kebijakan WTO.

Masalah ini mengharuskan NSB untuk ikut dalam skema yang diusulkan oleh negara maju. Munculnya *Doha Development Agenda* 2001 inilah yang menjadi awal keterbukaan WTO untuk

mengakomodasi kepentingan setiap negara anggota dan membuka negosiasi tentang masalah yang terjadi. Dalam tahap inilah, NSB muncul untuk memperjuangkan kepentingannya.

Doha Development Agenda, sebuah Momentum yang menunjukkan adanya perubahan sikap WTO. Mayoritas negara anggota WTO adalah NSB, dimana NSB muncul dengan kekuatan baru untuk melawan diskriminasi dan dominasi negara maju. India dengan aliansi negara G-33 memberikan tekanan kepada WTO untuk lebih melihat kepentingan NSB sebagai bentuk negosiasi yang perlu diperhitungkan. Aliansi kelompok G-20 sebagai gabungan negara maju dan NSB memberikan pengimbangan dimana India masuk dalam kelompok G-20 untuk memberikan tekanan diplomatik memperjuangkan masalah di NSB. Tekanan diplomatik ditujukan kepada negara maju agar masalah dapat dinegosiaikan sehingga mendapat perlindungan hukum secara legal dalam naungan rezim perdagangan global ini.

Tekanan yang berhasil dilakukan mendapatkan respon dari WTO, adapun respon tersebut meliputi perubahan sikap WTO yang terlihat dalam proses negosiasi yang dilakukan oleh India.

Masalah pembatasan *domestic support on agriculture* diperjuangkan oleh pemerintah India terhadap WTO pada tahun 2001 tidak mendapatkan respon yang positif. Tahun 2003, kelompok negara G-33 resmi terbentuk. Dimotori oleh India, perjuangan penentangan pembatasan *domestic support on agriculture* mengalami perkembangan. Proposal ini mulai dibahas dalam KTM WTO di Cancun, Mexico berdampak pada timbulnya perhatian negara anggota WTO lainnya. Berakhirnya *Peace Clause* yang dimiliki AS dan Uni Eropa berpengaruh pada optimism India dan NSB lainnya untuk mendapatkan hasil dari penentangannya tersebut.

Tahun 2008, menjadi momen penting dimana pada akhir Juli 2008 WTO menempatkan isu pertanian sebagai salah satu dari lima isu yang dibahas dalam *Bali Package Agenda* (Schnepf, 2014). Perubahan sikap WTO ini ditunjukkan oleh Dirjen WTO, Pascal Lamy yang kemudian dikenal dengan *The Lamy Draft* 25 Juli 2008 (Sawit, 2008). Meskipun didalamnya banyak penentangan akibat masih adanya dominasi kuat dari negara maju, hal tersebut dinilai sebagai perubahan sikap WTO yang mengindikasikan bahwa WTO sudah bersedia untuk

terbuka kepada NSB. Dalam pertemuan KTM WTO kali ini juga memberikan ruang bagi NSB untuk ikut dalam negosiasi *green room*. India mendapatkan mandat untuk mewakili NSB dan kelompok G-33 bersama dengan China dan Brazil. Pada pertemuan KTM WTO yang kesembilan di Bali, India berhasil mencapai kepentingannya dengan membawa *draft* klausul perdamaian tentang isu pertanian. Klausul perdamaian yang diajukan akhirnya berhasil disahkan dalam keputusan *Bali Package 2013*.

Bali Package merupakan ujung dari perjuangan India melakukan penentangan terhadap WTO tentang isu pembatasan *domestic support on agriculture* di NSB. Dalam KTM WTO kesembilan ini dihadiri oleh 159 negara anggota dan 25 negara observer yang totalnya adalah 97 persen negara WTO hadir dalam pertemuan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2013 ini (Wirjawan, 2016). Selain itu, pertemuan ini juga menjadi perhatian LSM internasional seperti ActionAid dan Oxfam (Sawit, 2008).

India yang diwakili oleh Menteri Anand Sharma, dalam KTM ini berpegang teguh pada pendiriannya untuk menentang adanya pembatasan

domestic support on agriculture di NSB dengan membawa aliansi kelompok G-33 serta diplomasi ketat terhadap negara maju dalam kelompok G-20. Kebutuhan ini bertolak belakang antar negara maju. Meskipun dalam *Bali Package* hanya mewakili 10 persen dari 19 isu yang diangkat dalam DDA namun dalam beberapa media internasional seperti *European Daily*, *Xin Hun*, *Asia Times*, *Channel New Asia*, *The Mirror*, dan *Helsinki Times* menyebutkan bahwa KTM kesembilan WTO di Bali dan *Bali Package* sebagai hasilnya, merupakan sebuah “*Accord*” yaitu sebuah kesepakatan yang memberi nafas dan arah baru bagi WTO dan perundingan selanjutnya (Pambagyo, 2016).

Respon WTO yang menolak putusan negara maju untuk menentang klausul perdamaian yang di ajukan oleh India membawa NSB memiliki ruang fiskal yang sedikit lebih luas. Negara maju (AS dan UE) akhirnya menyerah kepada India dalam perundingan WTO sehingga menyetujui permintaan India untuk menaikkan *domestic support on agriculture* dari angka 10 persen menjadi 15 persen selama empat tahun kedepan (Yogi, Tanpa Tahun). Dengan adanya keputusan tersebut, menjamin NSB untuk menyelesaikan masalah

pertanian, ketersediaan pangan dan kemiskinan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. NSB mempunyai fleksibilitas dalam bidang *domestic support* yang sedikit lebih longgar, bertolak belakang dengan keadaan negara maju yang telah memberikan subsidi besar pada pertanian sehingga dituntut untuk mengurangi subsidi secara drastis untuk menjaga keseimbangan pasar.

Momentum ini bukan hanya sebagai pencapaian yang memuaskan bagi India, akan tetapi juga sebagai ujung dari perubahan transformasi kebijakan WTO yang sebelumnya diskriminatif terhadap NSB. WTO kembali untuk menempatkan peran negara dalam penerapan kebijakan yang telah disepakati. Dengan memberi definisi baru bagi negara dalam perdagangan internasional.

Terbukanya WTO dengan problematika yang dihadapi NSB memperlihatkan adanya kepentingan WTO di balik hal tersebut. Melalui konsep *transformationalist globalist*, keputusan WTO ini didasari oleh dua kepentingan, yaitu WTO tidak ingin kehilangan dukungan dari NSB serta WTO ingin mentransformasi perannya dalam tata perdagangan internasional.

1. WTO Tidak Ingin Kehilangan Dukungan NSB

Dihadapkan pada kepentingan mayoritas negara anggota, WTO mulai untuk memberikan kesempatan negosiasi masalah yang selama ini terjadi pada NSB. Masuknya permasalahan pertanian akibat dari tuntutan India untuk mengadakan transformasi aturan kebijakan *domestic support on agriculture* mengindikasikan bahwa peran negara mulai dipertimbang. Dalam pandangan *transformationalist* *globalist* menyebutkan bahwa “Globalisasi akan mendefinisikan ulang tentang peran negara” (Stiglitz, 2007). Sama dengan pernyataan tersebut, WTO sebagai produk globalisasi sekarang telah memberikan fleksibilitas bagi negara untuk berperan menentukan arah perdagangan mereka.

India dengan sikap tegasnya menentang aturan WTO, kembali mendapatkan kesempatan untuk turut andil menentukan perdagangan domestiknya. Kekuatan India yang menjadi negara *middle power* mulai diperhitungkan seiring dengan India mempunyai posisi tawar yang besar. Ditambah dengan NSB seperti China, Korea Selatan, Brazil, dan Indonesia

yang didaulat menjadi negara dengan kekuatan baru yang mempunyai posisi tawar yang cukup diperhitungkan dalam dunia internasional (Bary, 2013).

2. WTO Ingin Mentransformasi Perannya Dalam Tata Perdagangan

Kaum *transformationalist* memandang secara kritis dan objektif bahwa fenomena globalisasi memiliki potensi yang besar dalam mencapai kesejahteraan, namun juga globalisasi merupakan janji-janji yang tidak pasti apabila tidak dilaksanakan secara baik (Sasmita, 2015). Berjalannya WTO seharusnya berpaku pada prinsip-prinsip yang melekat pada awal di cita-citakannya pembentukan untuk mengatur perdagangan internasional. Seiring dengan berjalannya WTO mengatur lalu lintas perdagangan global, independensi WTO seakan menjadi ‘semu’ dengan anggapan bahwa WTO merupakan rezim yang hanya mementingkan negara maju sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan.

Keputusan yang ditetapkan WTO dalam *Bali Package* menimbulkan sebuah fakta, bahwa WTO ingin mentransformasi perannya dalam tata perdagangan Internasional. Terbukti

dengan ditegaskannya kembali prinsip-prinsip WTO. Akan tetapi WTO mempertimbangkan agar kebijakannya dapat menjadi sebuah kebijakan yang membangun dan menerapkan pedoman *Positive Sum Game* yang diungkapkan oleh Adam Smith (Suhardi, 2007).

WTO ingin mentransformasi perannya kembali pada tujuan awal dibentuknya WTO, yaitu menciptakan perdagangan yang adil, transparan dan bijaksana. Hal itu terbukti dengan pertama, kembalinya prinsip non diskriminasi pada WTO. Selama WTO menjalankan perannya, WTO melakukan banyak diskriminasi terhadap NSB yang mempersempit kesempatan NSB untuk turut dalam perumusan kebijakan serta negosiasi yang dilakukan WTO. Prinsip non diskriminasi kemudian ditransformasi menjadi *equality as equality of fair opportunity* (Rawis, 1973).

Kedua, prinsip mendorong persaingan yang adil kembali ditekankan. Pada awalnya, persaingan antara negara maju dan NSB sangat didominasi oleh negara maju. NSB tidak mempunyai kesempatan yang sama apalagi mempunyai keseimbangan persaingan dengan negara maju. Sehingga, dengan diterapkannya

kebijakan *Bali Package* 2013 diharapkan mampu untuk menjadi sebuah dorongan untuk mendapatkan persaingan perdagangan yang adil.

Ketiga, pengkhususan perlakuan WTO terhadap negara maju kemudian dibatasi. Hal tersebut dilandasi pada bentuk transformasi peran WTO untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bukan lagi menjadi rezim yang dikontrol oleh negara maju. Disahkannya Doha *Development Agenda* dan tidak adanya perpanjangan klausul perdamaian kepada AS dan Uni Eropa merupakan bentuk bahwa WTO *concern* terhadap perkembangan perekonomian di NSB.

Keempat, perubahan komposisi dalam forum *green room* menunjukkan bahwa WTO kembali menerapkan prinsip transparansi. Dengan bergabungnya India, Brazil, dan China dalam perundingan forum *green room* merupakan sebuah langkah awal bahwa WTO ingin menerapkan sistem transparan terhadap setiap anggota WTO.

Momentum Doha *Development Agenda* yang berujung pada disetujuinya *Bali package* 2013 merupakan sebuah pembuktian bahwa WTO telah mampu mengakomodasi kepentingan NSB yang

sangat kompleks demi terciptanya perdagangan internasional yang memicu adanya pertumbuhan ekonomi tanpa adanya diskriminasi.

KESIMPULAN

Didasarkan pada pandangan kaum transformasionalis, transformasi tata perdagangan internasional yang dilakukan oleh WTO merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Penelitian ini telah memaparkan sebuah proses perubahan paradigma yang penting dalam perjalanan WTO sebagai rezim perdagangan global. Transformasi WTO tersebut merupakan sebuah kejanggalan ketika sebuah rezim perdagangan global yang menerapkan sistem liberal bersedia untuk mengakomodasi kepentingan negara yang dalam posisi mempunyai kekuatan menengah atau *middle power state*. Hasil penelitian ini berangkat dari reaksi India sebagai salah satu NSB yang menentang adanya aturan pembatasan *domestic support on agriculture*. Dengan adanya keputusan pada *Bali Package 2013*, yaitu dengan menaikkan standar *de minimis* dari 10 persen menjadi 15 persen bagi NSB menunjukkan bahwa dengan kekuatan diplomasi serta posisi tawar yang diperhitungkan, India bukanlah negara

peripheral akan tetapi telah menjadi negara yang memiliki kekuatan *middle power*.

Keputusan *Bali Package 2013* menyatakan bahwa WTO telah mendefinisikan ulang peran negara dalam tata kelola perdagangan internasional. Pandangan kaum *transformasionalist globalist* berhasil diterapkan dalam menganalisa perubahan sikap WTO. Kini, WTO tidak hanya kepanjangan kepentingan negara maju akan tetapi telah kembali menerapkan prinsip untuk menjadikan perdagangan bebas sebagai sarana agar terciptanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tidak ada diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- ActionAid. (2003). *The WTO Agreement on Agriculture*. Retrieved from www.actionaid.org.
- Bary, P. (2013, April 26). *Prospek Perdagangan Indonesia, Cina dan India melalui Analisa Gravity Model*. Retrieved from [www.kemendag.go.id: http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/04/26/-1366943584.pdf](http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/04/26/-1366943584.pdf)
- Cooper, A. F. (1993). *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order*. Vancouver: UBC Press.
- Government of India. (2013). *Statement of Shri Anand Sharma in Parliament on the 9th Ministerial Conference of WTO at Bali*. India: Press Information Bureau.
- Hasibuan, A. I. (2015). *Kebijakan Pangan Pasca Ratifikasi Agreement on*

- Agriculture. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* 1633 Vol.11 No.01.
- Kemenlu. (2016). *World Trade Organization (WTO)*. Retrieved from [Kemenlu.go.id: http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization)
- Lokollo, E. M. (2007). bantuan Domestik (Domestic Support) Salah Satu Pilar Utama Perundingan Pertanian Pada WTO. *Analisis Kebijakan Pertanian, Vol 5*.
- Pambago, I. (2016, 12 05). *Pelajaran dari KTM WTO di Bali*. Retrieved from [bsn.go.id: http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/4951#.WET7oJNqLrY](http://bsn.go.id)
- Planning Commission of India. (2011). *The Human Development Report: Towards Social Inclusion*. New Delhi: Oxford University Press.
- Putra, A. K. (2016). Agreement On Agriculture dalam World Trade Organization. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No.1 .
- Rawis, J. (1973). *The Theory of Justice*. New York: Oxford University Press.
- Rezlan Ishar Janie, A. S. (2008). *Persetujuan Bidang Pertanian (Agreement on Agriculture/AoA)*. Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI. Direktorat Jenderal Multilateral Department Luar Negeri.
- Sasmita, S. (2015). Refomasi Struktur Perdagangan Internasional dalam WTO: Perspektif Joseph E. Stiglitz. *Jurnal Hubungan Internasional UMY*, 198.
- Sawit, M. H. (2008). Perubahan Perdagangan Pangan Global dan Putaran Doha WTO: Implikasi buat India. *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*.
- Schnepf, R. (2014). Agriculture in the WTO Bali Ministerial Agreement. *Congressional Research Service* (p. 2). CRS Report.
- Shin, D.-m. (2012). *Concept of Middle Power and the Case of the ROK: A Review', Korea Yearbook 2012: Politics, Economy and Society*. Netherlands: Brill.
- Stiglitz, J. E. (2007). *Making Globalization Work*. London: Penguin Books.
- Suhardi, G. (2007). Peran WTO dalam Pembentukan Peraturan Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum Pro Justisia volume 25*.
- Tobing, E. R. (2015). Kepentingan India Meminta Amandemen Aturan Domestic Support dalam Agreement on Agriculture pada KTM WTO IX 2013. *JomFISIP Volume 2, UNIVERSITAS RIAU, 2*.
- U.N. News Service. (2015). *Jumlah Penduduk Dunia akan Mencapai 8,6 Miliar pada 2030, kata P.B.B*. Jakarta: Indo-Asia-Pacific Defense Forum.
- Utama, M. N. (2010). Diplomasi Indonesia. *FISIP UI* .
- Utama, M. N. (2010). Diplomasi Indonesia dalam perundingan Doha Development Agenda WTO. *FISIP UI*.
- Wirjawan, G. (2016, 12 04). *KTM WTO ke-9 dan Paket Bali*. Retrieved from [Kemendag.go.id: http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/12/17/ktm-wto-ke-9-dan-paket-bali-id0-1387252576.pdf](http://www.kemendag.go.id)
- WTO. (2016, 11 03). *AGRICULTURE NEGOTIATIONS: BACKGROUND*. Retrieved from [www.wto.org: https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd13_peace_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd13_peace_e.htm)
- WTO. (2016, 12 05). *Understanding the WTO: Principles of the Trading System*. Retrieved from [WTO.org: HTTP://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/fact2_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/fact2_e.htm)
- Yogi, C. D. (Tanpa Tahun). Ratifikasi Paket Bali Oleh India dalam Konferensi World Trade Organization (WTO) 2013. *Jurnal Hubungan Internasional UNEJ*, 9.

